

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PELARANGAN DAN PENERTIBAN
PENYAKIT MASYARAKAT DI KECAMATAN UJUNG BATU

IPASRI
ISRIL

ipehblack@ymail.com

Abstract

Regional autonomy regime implemented under Law No. 32 of 2004 does not - necessarily a blessing to people's lives change. Substantial powers granted to local governments are not used optimally for the interests of the community, especially for those who have limited access: women, children, the poor and marginalized groups. This is caused by the orientation of local government policies that tend to be budgetary. Tions is that then raises the problem that requires the center to conduct an executive review, even the Assembly had asked the Supreme Court to do yudicial activism.

Rokan Hulu so far the government has set regulations that seen in Regulation No. 1 of 2009 area on the prohibition and control of the disease, but the implication is still questionable. For example, just until now a number of cafes in the village lintam still operating even during the day there without clear rules, in addition to the suspect as a thinly veiled prostitution, the cafe also visited by school children.

In this study using an interview study in which researchers conduct Q & A on informants to obtain data and information on the formulation kebijaka, Observation (observation) is that researchers get the data by observation and systematic recording of symptoms and Documentation on policies that are the source of data obtained from the print media, documents.

Data analysis is the process of simplification of data into a form that is more easily read and interpreted. Research data that has been collected kualitatif fully analyzed.

From the description that was then that the problem is not easily eradicated the disease, because the disease problem arises because the relationship problems of economic, social and cultural. Therefore Rokan Hulu regency government has formulated a strict rule against the eradication of the disease in order to bring order and security in society. Thus, the authors define the central issue in this study as follows: "How Implementation of Rokan Hulu Regency Regulation No. 1 of 2009 on the prohibition and control of district Disease Society in Ujung Batu".

Keywords : Implementation, Regulation, and Social Ills

1.1 Latar belakang

Sejauh ini pemerintah Rokan Hulu telah menetapkan peraturan daerah yang terlihat pada Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang pelarangan dan penertiban penyakit masyarakat, namun secara implikasi ini masih dipertanyakan. Contohnya saja hingga sekarang sejumlah kafe di dusun lintam masih beroperasi bahkan pada siang hari tanpa ada aturan yang jelas, selain di duga sebagai tempat prostitusi terselubung, kafe tersebut juga di kunjungi oleh anak-anak sekolah.

Studi ini ingin melihat implementasi kebijakan pemerintah daerah Rokan Hulu Nomor 1 tahun 2009 tentang pelarangan dan penertiban penyakit masyarakat. Diakui bahwa sesungguhnya telah banyak kajian yang membahas tentang kebijakan implementasi, pengawasan hingga evaluasi akan tetapi studi ini berkaitan dengan fenomena terbaru yang terjadi di dalam masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah Rokan Hulu tentang penyakit masyarakat. Peraturan daerah tentang penyakit masyarakat ini pertama kali di keluarkan pemerintah daerah Rokan Hulu tahun 2009.

Dalam aspek sosial dan budaya, masyarakat Indonesia menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong-royong. Hal ini tergambar dari kegiatan yang dilakukan dengan bersama-sama, tanpa membedakan suku, adat, ras dan agama.

Dari segi agama masyarakat Rokan Hulu merupakan masyarakat yang religious dan sangat menghargai perbedaan agama. Sebagaimana yang kita ketahui di Rokan Hulu terdapat bermacam-macam agama seperti Islam, Kristen, dan Budha. Rokan Hulu menjuluki dirinya dengan "*NEGERI SERIBU SULUK*" Thareqat Naqsabandi-lah yang menjadi dasar julukan tersebut, dimana dizaman dahulu sangat banyak surau suluk, Sekarang ada dua hemah atau disebut dengan asal ajaran yang dibawa oleh mursyid dari dua orang Syekh. Yaitu dari Besilam Langkat Syekh Abdul Wahab Rokan, beliau ini sangat besar pengaruh thareqatnya saat sekarang dan berpusat di Besilam Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

Namun seiring dengan kemajuan Kabupaten Rokan Hulu saat ini sangat rentan terhadap hal-hal yang merusak mental spiritual masyarakat. Salah satu fenomena yang terjadi adalah maraknya penyakit masyarakat, mulai dari masalah prostitusi, praktik tuna susila, minuman keras dan kasus narkoba dikalangan masyarakat. Jadi masalah penyakit masyarakat ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan masyarakat yang mendiami wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Maka untuk itu diperlukanlah peraturan yang tegas untuk menindak dan menghapus penyakit masyarakat di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Perkembangan penyakit masyarakat ini selain bertentangan dengan norma-norma sosial dan norma-norma agama, dapat pula menimbulkan berbagai dampak negatif. Misalnya saja masalah prostitusi dapat mengakibatkan penyakit menular seksual di masyarakat dan sangat menakutkan, seperti Raja singa (Syphilis Hereditas), dan HIV (Human Immunodeficiency Virus), selain itu masalah prostitusi juga dapat merusak mentalitas masyarakat, terutama dikalangan generasi muda yang rentan terhadap pengaruh negatif dari budaya pelacuran. Namun di sini tidak hanya kaum muda, para orang-orang tua pun ada yang suka pelacuran, bahkan lebih ironis lagi terlibat dalam bisnis pelacuran. Selain itu, ada juga penyakit masyarakat yang meliputi minuman keras, perjudian dan narkoba di kalangan remaja. Hal ini bisa menimbulkan kriminalitas serta tingkat keamanan menurun di daerah Rokan Hulu.

Menyadari kompleksnya masalah penyakit masyarakat ini maka pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan ini telah mengeluarkan suatu kebijakan untuk mengatasi masalah penyakit masyarakat ini yang berorientasi kepada pembinaan dan pengentasan praktik prostitusi dan tunasusila, minuman keras, perjudian dan narkoba sebagai suatu tujuan yang mulia.

Penyakit masyarakat merupakan suatu gejala yang bertentangan dengan norma agama, adat istiadat dan sebagainya. Banyak dampak yang ditimbulkan oleh penyakit masyarakat ini misalnya saja masalah prostitusi dapat menularkan penyakit membahayakan kehidupan masyarakat secara keseluruhan seperti penyakit HIV-AIDS. Selanjutnya masalah minuman keras dan narkoba banyak menimbulkan tingkat kriminalitas serta sistem keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat terganggu. Untuk mencegah ini maka diperlukanlah suatu peraturan ataupun undang-undang untuk melarang tempat-tempat prostitusi, penjualan minuman keras, memberantas peredaran narkoba.

Dari sekian macam penyakit masyarakat, yang paling menonjol sekarang yang terjadi di daerah-daerah di Riau khususnya Kabupaten Rokan Hulu adalah masalah prostitusi. Masalah prostitusi sudah ada sejak lama, dan semakin hari semakin berkembang. Istilah lain dari prostitusi ini adalah pelacuran atau perlakuan seks di luar nikah. Pada umumnya prostitusi ini adalah wanita, namun tidak menutup kemungkinan seseorang lelaki.

Kalau ditelusuri lebih lanjut banyak faktor yang menyebabkan prostitusi ini antara lain : Keterkaitan dengan masalah ekonomi, sosial budaya, serta permasalahan manusia itu secara hakiki yaitu menyangkut masalah kebutuhan biologis.

Pemerintah kabupaten Rokan Hulu telah membuat suatu kebijakan untuk mengatasi masalah penyakit masyarakat ini yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang pelarangan dan penertiban Penyakit Masyarakat. Meskipun demikian kegiatan bisnis pelacuran tetap berjalan tanpa rasa takut dan segan bahkan buka 24 jam. Masalah ini terjadi karena kurangnya penanganan dari pemerintah terhadap praktik-praktik yang sangat memuaskan dan menguntungkan. Di kecamatan Ujung Batu terdapat satu lokasi pelacuran yaitu di desa Pematang Tebih. Lokasi ini tidak jauh dari pemukiman warga. Lokasi ini tertata rapi seperti hotel atau kompleks perumahan. Jadi berdasarkan fenomena tersebutlah penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Ujung Batu khususnya di Desa Pematang Tebih.

Ketua LKA Ujung Batu H A hakam kepada Riau Pos, mengaku gerah dengan kondisi kafe kafe di kecamatan ujung batu tersebut yang jumlahnya sudah sangat banyak. Menurutnya dari kafe tersebut terjadi berbagai hal pelanggaran hukum. Parat terkait jangan pejamkan mata. Sebab, kalau kami yang bertindak, kami di salahkan dan dianggap melanggar hukum. Kami minta agar aparat dengan perda yang ada bias tegas sebelum kafe tersebut meluas.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang pelarangan dan penertiban penyakit masyarakat di Kecamatan Ujung Batu”*

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai suatu cara yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data, mengklarifikasi kemudian menganalisa data dan keterangan tersebut guna tujuan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi.

Taylor dan Bogdan, (dalam Emmy 2005) menyatakan bahwa penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Rokan Hulu Kecamatan Ujung Batu Desa Pematang Tebih Dusung Lintang. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi tambahan bagi penulis.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi dan kondisi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Untuk itu dibutuhkan informan utama (*key informan*) sebagai titik tolak mendapatkan informasi tentang permasalahan penelitian.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan dan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, adapun data tersebut yang menyangkut kriteria-kriteria untuk menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari pihak kedua data tersebut berasal dari pihak yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Adapun data sekunder berupa laporan, ketetapan-ketetapan, dokumen-dokumen, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

yaitu peneliti mengadakan tanya jawab terhadap informan guna memperoleh data dan informasi mengenai formulasi kebijakan pemerintah tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Ujung Batu.

b. Observasi (pengamatan)

Yaitu dimana peneliti mendapatkan data berdasarkan hasil pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala mengenai kebijakan pemerintah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Ujung Batu.

c. Dokumentasi

Merupakan sumber data yang diperoleh dari media cetak, dokumen-dokumen, peraturan dan undang-undang terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Ujung Batu.

6. Teknik Analisa data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitatif. Setelah data pada penelitian ini diperoleh, data tersebut dikelompokkan, diuraikan sesuai dengan jenis data, kemudian disajikan

dalam bentuk tabel-tabel yang dilengkapi dengan penjelasan untuk selanjutnya dianalisa secara deskriptif yaitu sebuah analisa yang menjelaskan dan memaparkan kenyataan yang sesungguhnya terjadi dilapangan mengenai perumusan permasalahan dalam penelitian ini guna mendukung hasil kerja berdasarkan hasil wawancara yang kemudian akan ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, Pendapatan Daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi urusan rumah tangganya. Besar kecilnya jumlah dana yang diperlukan sangat tergantung pada luas wilayah dan keadaan demografi, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, kompleksitas kebutuhan penduduk serta hal-hal lainnya yang sangat mempengaruhi pertumbuhan sosial ekonomi daerah tersebut..

1.1.1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat di Kecamatan Ujung Batu

a. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam rangka pelarangan dan penertiban penyakit masyarakat diperlukan adanya kejelasan perilaku apa saja yang masuk kategori itu, pengertian dan batasannya, sanksi apa yang dapat dikenakan, siapa yang berwenang menangani perkara itu dan sebagainya. Dalam konteks ini implementasi perda No 1 Tahun 2009 tentang pelarangan dan penertiban Penyakit Masyarakat di kecamatan ujung baru Kabupaten Rokan Hulu menjadi sangat strategis. Implementasi Peraturan daerah Pelarangan dan penertiban Penyakit Masyarakat diharapkan akan menjadi instrumen hukum yang jelas bagi pihak yang berwenang untuk melakukan penindakan terhadap para pelakunya. Selama ini banyak perbuatan yang sebenarnya dipandang melanggar norma dan nilai sosial yang berlaku namun tidak ada tindakan dari aparat berwenang karena memang tidak ada atau tidak jelas aturan dan sanksi hukumnya.

Pemerintah pada saat ini juga telah berupaya memberantas penyakit masyarakat yang ada di kabupaten rokan hulu, akan tetapi belum sepenuhnya maksimal diakibatkan kordinasi pihak terkait termasuk masyarakat belum terjalis baik, mereka masih cenderung bergerak menurut inisiatif sendiri-sendiri, sehingga belum terlalu efektif. Perlu adanya perencanaan system yang baik dari pemerintah kabupaten rokan hulu dalam memberantas penyakit masyarakat dikecamatan ujung batu. Oleh karena itu pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 tentang Pelarangan dan penertiban Penyakit Masyarakat di Kecamatan Ujung batu akan didukung dengan system monitoring dan evaluasi yang dikembangkan dengan arahan sebagai berikut:

- a. Mendesign system monitoring dan evaluasi yang mengandung instrument dan teknik yang sesuai dengan tujuan program pembinaan dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.

- b. Metaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat secara akurat dan objektif.
- c. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaiuasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan atau bahan perbaikan program selanjutnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang pelarangan dan penertiban penyakit masyarakatdi Kecamatan Ujung Batu.diharapkan dapat memberikan pengaturan hukum yang tegas dan sesuai dengan *local content* yaitu norma dan nilai sosial lokal masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Ancaman sanksi hukum yang tegas melalui Peruturan Daerah itu diharapkan dapat efektif menanggulangi berbagai bentuk penyakit masyarakat yang saat ini masih marak di Kecamatan Ujung Batu.

Hanya perlu diingat, untuk mengatasi penyakit masyarakat, kecuali tindakan yang bersifat preventif diperlukan pula tindakan represif yaitu berupa tehnik rehabilitasi.Ada dua konsep tehnik rehabilitasi, yaitu menciptakan sistem-sistem dan program-program yang bertujuan untuk menghukum si pelaku dan pemberian sanksi pidana berupa hukuman bersyarat, hukuman kurungan atau hukuman penjara yang bersifat reformatif agar si pelaku berubah menjadi orang baik.

b. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 Oleh Masyarakat Rokan Hulu.

Setiap masyarakat mempunyai norma-norma yang mengatur kehidupan pribadi atau hubungan antar pribadi. Norma-norma yang berlaku diharapkan akan ditaati oleh setiap warga masyarakat agar kehidupan masyarakat berlangsung aman, tertib dan damai. Perilaku yang menyimpang (*deviant behavior*) dari norma-norma yang berlaku merupakan gejala yang abnormal dan akan menimbulkan problema sosial. Problema sosial semacam itu sering disebut sebagai “penyakit masyarakat” yang harus ditanggulangi.

Dari uraian diatas maka diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah kabupaten Rokan Hulu dan Lembaga atau Organisasi agama dalam menjalankan perda yang telah diuat sebelumnya.Berbagai upaya yang bersifat memajukan atau menanggulangi penyakit masyarakat perlu mendapat dukungan dan perhatian dari berbagai pihak yang terkait sehingga perjalanan perda itu selain dapat diawasi oleh masyarakat dan instansi yang terkait lainnya.Dalam masyarakat selalu muncul penyakit-penyakit masyarakat.Masyarakat dituntut untuk lebih aktif dalam berpartisipasi memberantas penyakit masyarakat yang ada di Kabupaten Rokan Hulu khususnya di Kecamatan Ujung Batu.

1.2.Faktor-fakor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 TentangPelarangan Dan Penertiban Penyakit Masyarakat di Kecamatan Ujung Batu.

Secara “patologi sosial” ada banyak faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya penyakit masyarakat.Misalnya faktor ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, faktor biologis, lemahnya penghayatan agama, dekadensi moral, budaya, perubahan nilai sosial dan sebagainya.Tidak ada kriteria baku untuk menetapkan apakah suatu gejala tetentu merupakan penyakit masyarakat atau bukan. Kriteria yang

berlaku pada masyarakat satu belum tentu sama bagi masyarakat yang lain, antara kelompok satu berbeda dengan kelompok yang lain. Kriteria itu pada dasarnya sangat relatif dan sangat tergantung pada sikap masyarakat sendiri untuk menentukan apakah suatu perilaku termasuk penyakit masyarakat atau bukan. Manifestasi dari penyakit sosial muncul jika terjadi kepincangan (*lag*) karena adanya ketidaksesuaian antara perilaku dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

1. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Oleh sebab itu faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang sangat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan setiap unsur manusia dan sumberdaya akan selalu berusaha dengan permasalahan “ bagaimana hubungan yang dilakukannya ”

Komunikasi yang terjadi dalam pelaksanaan peraturan Daerah diatas belum terjalin secara maksimal disebabkan masing-masing instansi bergerak secara individual dengan mengenyampingkan koordinasi sehingga ukuran tingkat keberhasilan dalam implementasi Perda diatas masih jauh dari apa yang diharapkan.

Dalam pemberantasan penyakit masyarakat dikecamatan ujung batu seharusnya komunikasi itu dapat berjalan secara maksimal, masing-masing pihak seperti, dinas social, Mui dan pihak kecamatan hendaknya bersama-sama berupaya membangun komunikasi yang baik dalam mengawal jalannya pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Di keluarkannya Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 tentang pelarangan dan penertiban penyakit masyarakat dikecamatan ujung batu, peran serta masyarakat dalam penanggulangan penyakit menular mempunyai pengertian/pemahaman yang kontradiktif disatu pihak dengan adanya peraturan daerah tersebut sangat membantu pemerintah dan masyarakat itu sendiri untuk dengan jelas dapat memahami apa yang harus dilakukannya, disisi yang lain pemahaman tentang dikeluarkannya pemerintah tersebut mempunyai pemahaman bertentangan dengan azas kepastian hukum. Perlu dilakukan penelitian untuk mencari hubungan antara kebijakan Peraturan Daerah pemerintah terhadap peran serta masyarakat dalam penanggulangan penyakit masyarakat. Dalam pasal 5 peraturan daerah nomor 1 tentang pelarangan dan penertiban penyakit masyarakat dikecamatan ujung batu diantaranya:

- Setiap orang dilarang beraksi erotis secara langsung yang membangkitkan nafsu birahi dan mempertontonkan keindahan tubuhnya dimuka umum;
- Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/ atau mengadakan perkumpulan yang mengarah kepada perbuatan asusila yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat.

2. Faktor Sumberdaya (*Resouces*) Manusia

Sumber daya juga mempunyai peranan penting dalam menyampaikan ketentuan atau aturan serta bagaimanapun akuratnya dalam menyampaikan ketentuan tersebut, namun jika personil yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan kurang memiliki sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan melaksanakan tugas, perintah, dan anjuran atasan. Selain itu, harus ada kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan

keahlian yang harus dimiliki sesuai tugas yang akan dikerjakan. Penyakit masyarakat itu akan terjadi apabila manusia memiliki kecenderungan untuk lebih mementingkan suatu nilai social budaya dari pada kaidah-kaidah yang ada untuk mencapai cita-citanya. Berpudarnya pegangan orang pada kaidah-kaidah, menimbulkan keadaan yang tidak stabil dan keadaan tanpa kaidah-kaidah.

3. Faktor Disposisi (*Dispositions*)

Disposisi diartikan sebagai kecendrungan, keiinginan, atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang semestinya dilakukan, juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan/program/peraturan. Pada kenyataannya kebanyakan para pelaksana tidak dapat mengimplementasikan kebijakan dengan leluasa karena adanya ketergantungan pada superioritas orang yang merumuskan kebijakan dan kompleksitas kebijakan itu sendiri.

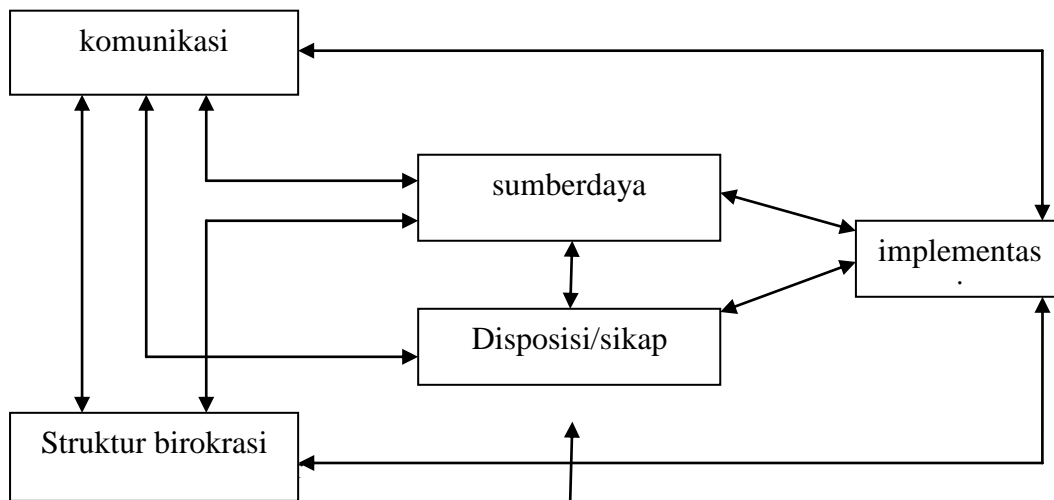
Cara yang akan dilakukan implementor untuk mengimplementasikan kebijakan sebagian besar tergantung pada kecendrungan (disposisi) mereka terhadap suatu kebijakan. Sikap tersebut dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap suatu kebijakan, dan bagaimana mereka melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan organisasi dan kepentingan pribadinya. Dalam pengertian lain disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.

Dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang pelarangan dan penertiban penyakit masyarakat di kecamatan ujung batu dipengaruhi oleh adanya kesepakatan dan keinginan dalam memberantas penyakit masyarakat oleh pihak-pihak yang terkait didalam sehingga dengan terjalinnya hubungan yang baik diantara masing-masing instansi akan mampu mengawal implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No 1 tahun 2009 tentang pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat di Kecamatan Ujung Batu.

4. Faktor Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Walaupun sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana memahami tujuan dan bagaimana cara melaksanakannya, serta mereka pun mempunyai keinginan untuk melakukannya. Namun implementasi masih bisa tidak efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi (*inefficiencies bureaucratic structure*) yang ada sebab keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks perlu adanya fragmentasi organisasi (organisasi yang terpecah-pecah) dapat merintangi koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu kebijaksanaan yang kompleks. In-efisiensi struktur birokrasi juga dapat memboroskan sumberdaya yang langka, terjadinya kekacauan dan kebingungan yang kesemuanya akan mengarah pada penyimpangan pelaksanaan kebijakan.

Hubungan ataupun interaksi antara faktor-faktor yang mempengaruhi derajat implementasi kebijakan (Edwards III AG, Subarsono, 2005 : 90) dapat dilihat pada gambar berikut :



1.1. faktor penentu implementasi

1.2.

Dalam Pemberantasan penyakit masyarakat di kecamatan ujung batu instansi itu cenderung terpecah-pecah menjadi beberapa bagian yang bergerak secara individual, untuk mengimplementasikan kebijakan Perda tersebut hendaknya perlu pemahaman interaksi antar actor politik yang dapat memajemen jalannya peraturan daerah tersebut, pengambilan keputusan itu hendaknya berdasarkan koordinasi dengan instansi terkait, dengan adanya komunikasi dalam setiap pengambilan keputusan diharapkan berbagai pihak dapat bersinergi memberantas penyakit masyarakat di kecamatan ujung batu. Pembinaan dalam struktur SDM merupakan langkah yang

baik dalam mengantisipasi terjadinya perluasan penyakit masyarakat di Kecamatan ujung batu sehingga masing-masing pihak dapat berpartisipasi dalam mnevaluasi jalannya peraturan daerah di kabupaten rokan hulu, khususnya kecamatan ujung batu.

5. Faktor Ekonomi

Setiap orang memiliki kecenderungan untuk melakukan perilaku menyimpang dari jalur yang telah ditentukan berdasarkan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuannya. Penyimpangan perilaku ini, semata-mata didorong oleh nilai-nilai social budaya yang dianggap berfungsi sebagai pedoman berperilaku kelakuan setiap manusia didalam hidupnya.

Factor ekonomi menjadi penyebab terjadinya penyakit masyarakat di kabupaten rokan hulu.Kabupaten yang seharusnya menjadi patokan kabupaten yang agamis malah melahirkan berbagai permasalahan yang menyimpang.Selain dikenal dengan sebutan Negeri Seribu Suluk.Ternyata Kabupaten Rokan Hulu yang sudah berusia 12 tahun pasca dimekarkan dari Kabupaten Kampar, masih banyak ditemukan berbagai lokasi prostitusi di Kabupaten ini.“Kebanyakan dari pelanggan kami di sini adalah supir-supur truk pengangkut alat berat dan pengangkut buah sawit dan warga di sekitar ini.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa kecamatan ujung batu menjadi tempat berkembangnya prostitusi dari penyakit masyarakat.Sulitnya mencari pekerjaan yang layak membuat berbagai masyarakat baik dari luar daerah maupun di dalam daerah tersebut membuat mereka cenderung mencari biaya hidup dari perilaku yang menyimpang.Perbaikan perilaku pejabat pemerintah hendaknya juga terlibat dalam kegiatan yang termasuk penyakit masyarakat perlu di evaluasi secara cepat. Kerena hal ini merupakan salah satu bukti bahwa peran pemerintah seharusnya sangat diperlukan bagi pembenahan kabupaten ini menjadi lebih baik lagi, dengan menyediakan fasilitas kerja yang layak akan dapat meminimalisir terjadinya penyakit masyarakat khususnya di kecamatan Ujung Batu ini.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 tentang larangan dan penertiban penyakit masyarakat dikecamatan Ujung Batu bukan langkah akhir untuk menanggulangi penyakit masyarakat, tetapi masih perlu diikuti oleh law enforcement secara tegas dan konsisten. Seringkali setelah peraturan di buat tidak ada upaya pendayagunaan secara konsisten, sehingga hanya menjadi peraturan yang tidur dan tidak mempunyai efek sosial yang diharapkan. Berikut ini adalah beberapa factor yang menyebabkan terjadinya penyakit masyarakat di kecamatan ujung batu kabupaten Rokan Hulu diantaranya:

1. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Dalam pemberantasan penyakit masyarakat dikecamatan ujung batu seharusnya komunikasi itu dapat berjalan secara maksimal, masing-masing pihak seperti, dinas social, Mui dan pihak kecamatan hendaknya bersama-sama berupaya

membangun komunikasi yang baik dalam mengawal jalannya pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Di keluarkannya Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 tentang pelarangan dan penertiban penyakit masyarakat dikecamatan ujung batu, peran serta masyarakat dalam penanggulangan penyakit menular mempunyai pengertian/pemahaman yang kontradiktif disatu pihak dengan adanya peraturan daerah tersebut sangat membantu pemerintah dan masyarakat itu sendiri untuk dengan jelas dapat memahami apa yang harus dilakukannya, disisi yang lain pemahaman tentang dikeluarkannya pemerintah tersebut mempunyai pemahaman bertentangan dengan azas kepastian hukum. Perlu dilakukan penelitian untuk mencari hubungan antara kebijakan Peraturan Daerah pemerintah terhadap peran serta masyarakat dalam penanggulangan penyakit masyarakat. Dalam pasal 5 peraturan daerah nomor 1 tentang pelarangan dan peneriban penyakit masyarakat dikecamatan ujung batu diantaranya:

- Setiap orang dilarang beraksi erotis secara langsung yang membangkitkannafsu birahi dan mempertontonkan keindahan tubuhnya dimuka umum;
- Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/ atau mengadakanperkumpulan yang mengarah kepada perbuatan asusila yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat.

2. Faktor Sumberdaya (*Resoussces*) Manusia

Penyakit masyarakat itu akan terjadi apabila manusia memiliki kecenderungan untuk lebih mementingkan suatu nilai social budaya dari pada kaidah-kaidah yang ada untuk mencapai cita-citanya. Berpudarnya pegangan orang pada kaidah-kaidah, menimbulkan keadaan yang tidak stabil dan keadaan tanpa kaidah-kaidah.

3. Faktor Disposisi (*Dispositions*)

- Cara yang akan dilakukan implementor untuk mengimplementasikan kebijakan sebagian besar tergantung pada kecendrungan (disposisi) mereka terhadap suatu kebijakan. Sikap tersebut dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap suatu kebijakan, dan bagaimana mereka melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan organisasi dan kepentingan pribadinya. Dalam pengertian lain disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.
- Dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang pelarangan dan penertiban penyakit masyarakat di kecamatan ujung batu dipengaruhi oleh adanya kesepakatan dan keinginan dalam memberantas penyakit masyarakat oleh pihak-pihak yang terkait didalam sehingga dengan terjalannya hubungan yang baik diantara masing-masing instansi akan mampu mengawal implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No 1 tahun 2009 tentang pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat di Kecamatan Ujung Batu.

4. Faktor Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Dalam Pemberantasan penyakit masyarakat di kecamatan ujung batu instansi itu cenderung terpecah-pecah menjadi beberapa bagian yang bergerak

secara individual, untuk mengimplementasikan kebijakan Perda tersebut hendaknya perlu pemahaman interaksi antar actor politik yang dapat memajemen jalannya peraturan daerah tersebut, pengambilan keputusan itu hendaknya berdasarkan koordinasi dengan instansi terkait, dengan adanya komunikasi dalam setiap pengambilan keputusan diharapkan berbagai pihak dapat bersinergi memberantas penyakit masyarakat dikecamatan ujung batu.

5. Faktor Ekonomi

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa kecamatan ujung batu menjadi tempat berkembangnya prostitusi dari penyakit masyarakat. Sulitnya mencari pekerjaan yang layak membuat berbagai masyarakat baik dari luar daerah maupun di dalam daerah tersebut membuat mereka cenderung mencari biaya hidup dari perilaku yang menyimpang. Perbaikan perilaku pejabat pemerintah hendaknya juga terlibat dalam kegiatan yang termasuk penyakit masyarakat perlu di evaluasi secara cepat. Karena hal ini merupakan salah satu bukti bahwa peran pemerintah seharusnya sangat diperlukan bagi pembenahan kabupaten ini menjadi lebih baik lagi, dengan menyediakan fasilitas kerja yang layak akan dapat meminimalisir terjadinya penyakit masyarakat khususnya di kecamatan Ujung Batu ini.

b. Saran

Dari uraian diatas pemerintah hendaknya lebih menekankan adanya hukuman yang lebih membuat jera para pelaku prostitusi, karena dengan adanya tindakan yang seperti itu akan selain dapat mengurangi jumlah pelaku prostitusi juga akan memperbaiki citra Pemerintah dan daerah yang ada dirokan hulu khususnya di Kecamatan Ujung Batu. Serta masyarakat juga harus ikut bersinergi dalam membrantas penyakit masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharma Setyawan Salam, 2004, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Daymon dan Holloway, 2008. *Metode-metode Riset Kualitatif*, Banteng: Yogyakarta.
- Deddy Supriadi Bratakusumah, Dadang Solihin. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Hamid Patilima. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- HAW. Widjaja. 2002. *Otonomi daerah dan daerah otonom* Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka
- Ishak. 2010. *Posisi Politik Masyarakat Dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Penaku.
- I Ketut Putra Erawan, 2004. *Dasar-Dasar Pengawasan*, Bandung: Rnika Cipta.
- Kartono, Kartini. 2011. *Patologi Sosial Jilid I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Koentjraningrat(ed).1988. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia
- Perda No. 1 Tahun.2009. *Tentang Penertiban dan Pelarangan Penyakit Masyarakat*. Rokan Hulu: Dinas Kesejahteraan Sosial.
- Suharto Bahar. 1993. *Pengertian, Fungsi, Format bimbingan dan Cara Penulisan Karya ilmiah*. Bandung: Tarsito
- Soekanto, Soedjono. 2002. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi (Konsep Strategi dan Kasus)*. Yogyakarta; Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).
- Wahab, Solichin. Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winardi. 2007. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.